

GERAKAN PEMBAHARUAN ISLAM INDONESIA DARI MASA KE MASA: SEBUAH PENGANTAR

*Soegijanto Padmo**

ABSTRACT

This paper attempts to explore the roles of Islamic social organizations which have been very instrumental in the social and cultural transformations in Indonesia. The birth of Islamic organizations and Islamic leaders cannot be separated from oppression of the colonials which had resulted in poverty and backwardness among the Indonesian people. The exploitation of the colonial rulers as well as the oppression of the feudal authorities had created bad attitudes which were against the values of Islam. This paper also observes the conditions which gave birth to some Islamic social movements and describes how social and cultural environments had forced the Islamic leaders and social organizations to find the way out of the problems by conducting social and cultural reformation. They had been successful and the present reformists should learn from their success.

Key words : sosial, politik, penindasan, kemiskinan, organisasi, pendidikan.

PENGANTAR

Kemajuan umat Islam di Indonesia tidak lepas dari peran tokoh dan berbagai organisasi keislaman yang secara aktif melakukan kegiatan amal usaha yang meliputi bidang agama, pendidikan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Munculnya tokoh dan berbagai organisasi Islam merupakan pendorong bagi proses transformasi sosial dan budaya yang signifikan dalam sejarah Bangsa Indonesia. Kolonialisme dan kehidupan masyarakat dalam masa tradisional feodal ditengarai sebagai faktor pendorong yang dominan bagi lahirnya berbagai organisasi keagamaan yang pada umumnya ingin menggunakan organisasi tersebut sebagai wadah gerakan sosial keagamaan. Masyarakat kolonial yang eksploitatif dan penguasa feodal yang opresif dianggap sebagai biang keladi bagi kemiskinan dan keterbelakangan yang melilit kehidupan masyarakat

pada umumnya. Kemiskinan dan keterbelakangan menimbulkan berbagai penyakit masyarakat seperti bid'ah, tahyul, khurafat, serta perilaku yang bertentangan dengan agama Islam. Masalah masyarakat yang kompleks itu menjadi setting bagi munculnya berbagai gerakan sosial keagamaan di berbagai tempat di Indonesia. Dalam tulisan ini, diketengahkan kondisi bagi lahirnya beberapa gerakan sosial islam, kegiatan amal usaha yang dilakukan, serta peran kaum modernis dalam transformasi sosial yang terjadi di negeri ini.

SETTING SOSIAL BUDAYA INDONESIA PADA MASA KOLONIAL

Struktur masyarakat kolonial diwarnai pola hubungan sosial yang sangat diskriminatif dan opresif. Pelapisan sosial yang sangat ketat menempatkan bangsa Eropa sebagai kelom-

* Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

pok teratas dan memiliki hak istimewa seperti menikmati berbagai fasilitas sosial. Lapisan kedua ditempati oleh bangsawan tradisional dengan segala hak istimewa dalam masyarakat feodal tradisional seperti memperoleh pelayanan wajib dari masyarakat tradisional rendahan. Masuk dalam lapisan kedua ini adalah golongan timur asing, yaitu orang Cina dan Arab. Lapisan ketiga atau paling bawah adalah masyarakat kebanyakan yang hanya memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dari lapisan atas tanpa mempunyai hak.

Pada masa kolonial, bangsa Eropa di samping sebagai pemegang kekuasaan politik juga berperan sebagai pemegang kendali ekonomi. Di daerah kerajaan (*Vorstenlanden*) seperti Yogyakarta dan Surakarta maupun daerah lain seperti Cirebon, Mangkunegaran, dan Pakualaman, pemerintah kolonial tidak menguasainya secara langsung, tetapi pengaruhnya cukup kuat seperti yang tampak dalam pemilihan *patih* dan urusan keuangan internal. Sementara itu, di daerah yang langsung dikuasai kumpeni terjadi hubungan langsung antara rakyat pribumi dengan orang Barat. Dalam politik pemerintahan, pejabat Belanda diposisikan sampai tingkat residen, asisten residen, dan *kontrollir* di tingkat *Regentschap* atau kabupaten. Di wilayah perkebunan seperti Karesidenan Surakarta hampir tidak ada desa yang terbebas dari perusahaan tanaman perkebunan oleh perusahaan swasta Belanda.

Di luar Jawa seperti di Sumatra Barat, Sistem Tanam Paksa memang pernah dicoba tetapi tidak dilanjutnya. Meskipun demikian, perusahaan tanaman perkebunan seperti kopi oleh penduduk asli justru berhasil meningkatkan ekonomi daerah (Dobbin, 1992). Di Maluku, sistem perusahaan tanaman rempah-rempah seperti cengkeh, dan pala dikontrol secara ketat oleh penguasa kolonial lewat kaki tangan mereka, yaitu penguasa tradisional. Di Jawa Sistem Priangan yang sangat menguntungkan penguasa di Tanah Pasundan diadopsi oleh Van den Bosch dalam mengusahakan tanaman kopi di berbagai daerah di Indonesia. Daerah di Jawa Timur dan Jawa

Barat dikenal sebagai penghasil gula dengan tiga wilayah sentralnya, yaitu di kompleks Karesidenan Surabaya, Karesidenan Rembang, serta kompleks Karesidenan Cirebon (Dick, 1998). Di wilayah perkebunan, pengusaha swasta Belanda memperoleh tanah dengan cara menyewa dari penguasa feodal yang memiliki tanah dan penduduk. Oleh karena itu, pengusaha Belanda yang menyewa tanah dari penguasa tradisional akan memperoleh tenaga kerja yaitu penduduk yang ada di wilayah tersebut. Tanah dan tenaga kerja yang diperoleh dengan murah itu diikat dengan kerja wajib untuk kepentingan perusahaan perkebunan. Kerja wajib oleh penduduk desa pada perusahaan perkebunan sebenarnya adalah kelanjutan dari kerja wajib yang harus disangga oleh penduduk pada penguasa tanah yaitu bangsawan pejabat kerajaan yang tinggal di ibu kota. Di bawah koordinasi penguasa desa, yaitu *beke*, penduduk desa melakukan kegiatan usaha tani yang disebut sistem *maro*. Kecuali harus menyerahkan separuh dari hasil panen kepada pemilik tanah atau *patuh*, penduduk juga harus menyangga sekitar 27 kerja wajib bagi kepentingan desa dan penguasa pemilik tanah (Padmo, 2004; Suhartono, 1991; Abdullah, 1987).

Kewajiban untuk menyerahkan hasil panen kepada pemilik lahan di kota merupakan acara rutin atau *pisowanan* yang ditradisikan dua kali setiap tahun, yaitu pada setiap *grebeg* Mulud dan Besar. Setelah Perang Diponegoro, kewajiban *sowan* ke kota menjadi tiga kali, yaitu pada *grebeg* Mulud, Puasa, dan *grebeg* Besar. Tujuan dari *pisowanan* ini adalah untuk melakukan pengawasan dari raja kepada pejabat yang lebih rendah yang bermukim di luar istana atau penguasa di daerah lainnya. Selama *pisowanan* itu, kegiatan para pejabat adalah berjudi dan berfoya-foya dengan wanita dan minuman keras. Sementara itu, pengikutnya melakukan tugas memperbaiki bangunan milik bangsawan ataupun membangun gedung atau fasilitas lain yang diperlukan. Singkatnya kegiatan *pisowanan* sebenarnya adalah mekanisme control oleh pemerintah pusat untuk menghilangkan akumulasi surplus di kalangan

pejabat kecil di luar istana sehingga kemungkinan munculnya pesaing bagi penguasa pusat menjadi sangat kecil. Sementara itu petani pedesaan yang menjadi sumber pendapatan penguasa daerah juga banyak disibukkan dengan kerja wajib serta pekerjaan lain di istana sehingga produksi yang mereka hasilkan sangat sedikit. Dalam kondisi seperti itu serta adanya kebiasaan pejabat untuk mengambil apapun milik rakyat kecil seenaknya mendorong masyarakat untuk tetap berada dalam keadaan miskin karena petani di Jawa tidak pernah terangsang untuk menghasilkan surplus karena apa pun yang mereka miliki pada siang hari akan menjadi incaran penguasa kerajaan dan pada malam hari akan menjadi incaran perampok.

Di luar Jawa, seperti Sumatra Barat, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi adat yang berada dalam control kaum adat. Kebiasaan berjudi dan sabung ayam serta minum minuman keras merupakan hal yang dikerjakan oleh masyarakat. Meskipun kaum ulama cukup penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi kaum adat lebih kuat pengaruhnya terhadap keberlangsungan praktik yang telah mewarnai kehidupan masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh agama. Kaum adat di Sumatra Barat dan kelompok feodal tradisional di daerah lain di nusantara yang memegang kekuasaan politik dan ekonomi mempunyai peran penting dalam proses akumulasi surplus pada masing-masing wilayah. Secara umum, kelompok masyarakat dari lapisan bawah adalah mereka yang harus menanggung beban dalam melakukan berbagai kerja wajib untuk kepentingan penguasa serta kerja wajib lain tanpa upah. Dalam konteks itulah, penderitaan dan kemiskinan yang mendera selama beberapa generasi dirasakan sebagai penderitaan yang hanya bisa diatasi oleh kekuatan supranatural berupa kepercayaan *cargo cult* (Fox, t.th) dan gerakan mesianisme yaitu kepercayaan akan datangnya Ratu Adil (Kartodirdjo, 1962).

Dalam kondisi yang serba menghimpit kehidupan *wong cilik* semacam itulah,

misalnya, KHA Dahlan sampai pada penilaian bahwa masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Jawa adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Penyebab dari adanya masalah tersebut adalah penindasan oleh penguasa kolonial dan keserakahan penguasa tradisional. Untuk mengentaskan masyarakat dari penderitaan itu, kuncinya hanyalah pendidikan. Secara harafiah, KHA Dahlan menyebutkan bahwa pendidikan berupa penguasaan ilmu agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan disimbolisasikan dengan penguasaan kitab kuning dan kitab putih. Fenomena di daerah lain di Indonesia pada dasarnya mirip dengan apa yang disampaikan oleh KHA Dahlan bahwa para ulama mendirikan organisasi sebagai wadah bagi gerakan yang berupaya untuk mendorong proses transformasi sosial dan budaya bukan saja ditujukan untuk masyarakat Islam tetapi juga untuk seluruh kelompok miskin dan tertindas sesuai dengan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

GERAKAN PEMBAHARUAN ISLAM

Abad ke-20 dinilai sebagai awal terjadinya gerakan untuk menegakkan Islam demi kemuliaan agama Islam sebagai idealita dan kejayaan umat sebagai realita dapat diwujudkan secara konkret dengan menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya.

Kesadaran baru yang muncul saat itu adalah keyakinan bahwa cita-cita yang besar dan berat itu hanya dapat direalisasikan dengan organisasi yang efisien dan efektif (Pasha dan Darban, 2002). Disadari pula gagasan baru itu hanya akan tersebar luas jika digunakan media yaitu majalah. Gagasan perlunya pembaharuan memang telah muncul sebelum abad ke-20, yaitu sejalan dengan pulangnya ulama yang telah menuntut ilmu di Mekah yang bersamaan pula dengan berkembangnya gerakan Wahabi yang menginginkan pemurnian pelaksanaan ajaran Islam. Gerakan yang muncul mulai dari upaya perseorangan dengan membuka surau atau madrasah, penerbitan majalah, serta pembentukan organisasi sosial,

ekonomi, keagamaan, dan bahkan kemudian bergeser ke organisasi politik. Dalam bagian ini akan dikemukakan organisasi yang muncul di Sumatra Barat yang dipelopori oleh perseorangan atau ulama kemudian berhasil membuat jaringan dalam memerangi kemaksiatan dan kemungkaran. Gerakan itu semula bertujuan melawan dominasi Cina dalam perdagangan batik, serta gerakan yang bergiat dalam masalah sosial kemasyarakatan seperti Al-Irsyad, Persatuan Islam, serta Muhammadiyah.

Para peneliti sering mengkaitkan munculnya kegiatan pendidikan Islam dengan masuknya Islam ke suatu daerah (Junus, 1985). Junus menyatakan bahwa masuknya Islam ke Sumatra Barat yang diperkirakan pada tahun 1250 merupakan tonggak pendidikan Islam di Mingkabau dimulai. Syekh Burhanuddin adalah ulama terkenal yang dipercaya sebagai pendiri surau atau madrasah di Ulakan, tempat beliau menetap. Surau ini dipercaya sebagai surau yang pertama kali didirikan di Minangkabau. Sebelumnya, ia belajar ilmu agama di Kotaraja, Aceh pada Syekh Abdul Rauf bin Ali dari Singkil. Selesai belajar di Kutaraja, Burhanuddin kembali ke Pariaman di Kampong Sintuk, tempat kelahirannya, baru kemudian beliau pindah ke Ulakan.

Meskipun data tentang sistem pendidikan yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin tidak diketahui, dikisahkan bahwa sebelum datang ke Minangkabau beliau belajar agama di Aceh selama 10 tahun. Di Minangkabau terdapat banyak ulama terkenal yang aktif mengajarkan agama bukan saja di kampung halamannya, tetapi juga ke daerah lain. Pada tahun 1603, terdapat tiga orang dari Minangkabau yaitu Datuk ri Bandang, Datuk Patimang, dan Datuk di Tiro pergi ke Sulawesi, untuk menyiarkan agama Islam.

Syekh Burhanuddin mempunyai murid. Salah satu muridnya yang termasyur adalah Tuanku Mansiang Nan Tuo di Paninjauan. Selain itu, datang pula seorang ulama, yaitu Tuanku di Tanah Rao dari Mekah, yang membawa ilmu mantiq dan Ma'ani, yang menurunkan ilmunya kepada Tuanku nan Kacik dalam negeri Koto Gedang.

Pada tahun 1803, tiga orang Minang, satu orang dari Sumanik, Tanah Datar, seorang dari Pandai Sikat, dan seorang dari Piobang, Lima Puluh Koto, pergi berhaji dan tinggal lima tahun di Mekah. Saat itu, gerakan Wahabi sedang berkembang di Mekah. Kaum Wahabi melarang orang merokok, makan sirih, berpakaian yang indah-indah, dan menyuruh rajin melakukan sembahyang. Sepulang ke Minang, mereka menyaksikan praktik kehidupan di Minang sangat berbeda dengan apa yang dilihatnya di Mekah. Ketiga orang ini membawa semangat Islam yang diilhami oleh gerakan Wahabi yang puritan. Sementara itu, di di Luhak Agam para tuanku mengadakan kebulatan tekad untuk menegakkan syara' sekaligus memberantas kemaksiatan yang mulai semarak dikerjakan oleh kaum adat. Para ulama tersebut adalah Tuanku nan Renceh, Tuanku Bansa, Tuanku Galung, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Kubu Ambelan, dan Tuanku Kubu Sanang. Di samping delapan tokoh itu, pembaharu Islam di Minangkabau adalah kaum Paderi yaitu Muhammad Syahab yang membangun benteng di Bonjol sehingga ia dikenal dengan Imam Bonjol.

Dalam melakukan pembaharuan banyak di antara mereka menggunakan cara kekerasan sehingga terjadi konflik antara kaum Paderi dan kaum adat, yang diakhiri dengan perang terbuka. Karena dalam pertempuran itu kaum adat selalu mengalami kekalahan, kemudian mereka minta bantuan kepada Kumpeni. Dengan senang hati Kumpeni menyanggupi. Perang babak baru dimulai setelah Kumpeni mendatangkan bala bantuannya untuk memerangi kaum Paderi. Mulai saat itu, kaum Paderi bukan menghadapi kaum adat, melainkan perang melawan kaum kafir Belanda.

Ulama lain yang kritis terhadap adat Minang adalah Syaikh Ahmad Khatib, lahir di Bukittinggi pada tahun 1855. Pada usia 21 tahun, ia pergi ke Mekah dan menetap di sana untuk memperdalam pengetahuan agama Islam yang berpahamkan madzab Syafe'i. Ia mampu mengembangkan ilmunya sehingga diangkat menjadi Imam Madzab Syafe'i di

Masjid 'il Haram. Beliau adalah ulama yang cerdas, kritis, sekaligus toleran. Secara terang-terangan, ia tidak menyetujui aliran Naqsa-bandiyah serta terhadap adat pembagian waris model Minangkabau yang memberikan waris kepada keponakan. Muridnya diberi kebebasan membaca buku termasuk tafsir Al Manar-nya Muhammad Abduh maupun tulisan kaum pembaharu lainnya dengan harapan bahwa murid akan memahami pikiran baru sehingga akan menentanginya. Tetapi yang terjadi adalah bahwa mereka justru menjadi pendukung pembaharuan tersebut seperti Syeck Muhammad Jambek, Abdul Karim Amrullah, Abdullah Ahmad, dan Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah). Sebagian murid lainnya yang berpegang pada Madzab Syafe'i antara lain Syeh Sulaiman Rasul, dan Hasyim Asy'ari yang pendiri Nahdatul Ulama (Noer, 1985).

Ulama pembaharu Islam lain dari Minangkabau adalah Syaikh Thahir Djalaluddin al-Azari yang ide pembaharuannya disalurkan lewat majalah *Al-Imam*, Syaikh Jamil Jambek, Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan Haji Rasul (ayah HAMKA). Tokoh lain adalah Abdullah Ahmad yang ide pembaharuannya disalurkan lewat *Al-Munir* yang bertujuan untuk "memimpin dan memajukan anak-anak bangsa kita ... pada agama yang lurus dan pada i'tikad yang betul". Pengetahuan tentang Islam tokoh ini diakui oleh ulama Timur Tengah dan pada satu konferensi khilafat di Cairo pada 1926 dia bersama Haji Rasul menerima gelar kehormatan Doktor dalam Bidang Agama (Doktor Fiddin). (Noer, 1985:47).

Meskipun cikal bakal gerakan politik di Indonesia disebutkan diawali oleh berdirinya Serikat Dagang Islam (SDI), pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk menciptakan daya saing yang kuat di kalangan usahawan pribumi dalam melawan dominasi Cina dalam industri batik yang *dibekingi* Belanda. Organisasi yang didirikan oleh seorang tokoh, yaitu Haji Samanhudi di Solo pada 16 Oktober 1905, gerakannya diarahkan pada beberapa tujuan, yaitu menghimpun kekuatan pedagang batik guna melawan pedagang Cina yang memono-

poli perdagangan bumbu batik dan menghadapi superioritas Cina terhadap pedagang Indonesia sebagai dampak Revolusi Cina pada 1911. Sikap itu merupakan keberhasilan dari kebijakan kolonial yang cukup lama yang membagi lapisan sosial kolonial menjadi tiga, yaitu lapisan atas adalah orang Belanda, lapisan kedua adalah orang Cina dan Timur Asing lain, dan lapis ketiga adalah bangsa Indonesia yang memilih kewarganegaraan Belanda. Politik memecah belah ini dilaksanakan dalam pendidikan sebagai implikasi dari Politik Etis dengan anak orang Cina dimasukkan ke pendidikan kelas dua dan anak-anak priyayi masuk sekolah kelas tiga.

Tujuan SDI itu dengan cepat memperoleh dukungan antara lain dari masyarakat pribumi yang mempunyai fanatisme Islam yang kuat bukan saja perasaan anti-Cina yang timbul, tetapi juga perasaan antikolonial serta pegawai Belanda yang telah membuat penderitaan di kalangan pribumi. Atas usul Tjokroaminoto agar keanggotaan SDI jangan dibatasi hanya golongan pedagang, tetapi diperluas sehingga kata dagang saat menyusun anggaran dasar dihapus diganti dengan nama Sarikat Islam. Dengan demikian, pergerakan Serikat Islam yang semula sekedar untuk memajukan perdagangan, saling membantu terbinanya rohani dan jasmani, memajukan masyarakat beragama Islam, pada tahun 1917 berkembang menjadi pergerakan politik yang menggunakan Islam sebagai dasar perjuangannya dan mencita-citakan kemerdekaan.

Peran Haji Samanhudi dalam mengobarkan semangat keagamaan ditunjukkan oleh anjuran yang ia sampaikan pada beberapa kesempatan. Pada tahun 1912 dalam satu kongres SI di Surabaya ia mengatakan bahwa setiap orang yang lahir ke dunia ini membawa fitrah masing-masing. Fitrah ini harus diperjuangkan. Oleh karena itu, SDI sebagai organisasi Islam harus memperjuangkan upaya untuk mengembalikan fitrah setiap hamba Allah, yaitu sebagai makhluk yang bebas. Apabila dalam kongres SI di Solo H Samanhudi masih sebatas menegaskan pentingnya memper-

juangkan kembalinya fitrah manusia ciptaan Allah, dalam kongres SI di Bandung pada tahun 1916 H Samanhudi sekali lagi menggarisbawahi pentingnya kebebasan bagi individu dari ketertindasan oleh orang lain dan perlunya menghilangkan segala bentuk penjajahan. Pandangan ini sangat radikal dan menjadi semakin mengkristal dengan masuknya aliran sosialis yang dibawa Snevliet ke dalam SI sehingga muncullah SI merah dan SI putih.

Al-Jamiat Al Khair yang lebih dikenal dengan jamiat kahir didirikan pada 17 Juli 1905 sebagai organisasi islam tanpa diskriminasi asal-usul meskipun sebagian besar penggerakannya adalah Arab peranakan. Bidang usaha organisasi ini adalah pendidikan dan sosial. Untuk menyukkseskan kegiatan usaha pendidikan, mereka memanggil pakar pendidikan, yaitu Syekh Ahmad Soorkati dari Sudan, Syekh Muhammad Thaib dari Maroko, dan Syaikh Muhammad Abdul Hamid dari Mekah. Di antara mereka, Ahmad Soorkati yang paling menonjol dalam hal menanamkan ide pembaharuan pendidikan di kalangan masyarakat Islam di Indonesia.

Kehadiran tokoh pendidikan dari luar negeri yang semakin banyak pada umumnya adalah pengikut Muhammad Abduh. Mereka antara lain menganjurkan persamaan sesama muslim dan kembali ke pemikiran kepada Al Quran dan Hadist. Sikap pemikiran ini ternyata mengundang reaksi keras, terutama dari peranakan Arab kelompok sayid yang selama ini menikmati penghormatan berlebihan dan merasa dirinya berkedudukan tinggi dari golongan lain dalam masyarakat Islam di Jawa. Perbedaan ini membawa organisasi Al Khair mengalami perpecahan.

Gerakan al-Islah wal Irsyad atau al-Irsyad merupakan sempalan al-Khair karena terdapat perbedaan dalam jama'ah al-Khair khususnya tentang persoalan "kafaah", yaitu boleh tidaknya golongan Arab keturunan Ali bin Abi Thalib (golongan Alawy) menikah dengan golongan lain. Menurut Soorkati, pernikahan seperti itu boleh berdasarkan surat al-Hujurat: 13 bahwa 'yang dinilai paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa'.

Al Irsyad didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati pada 1914 dengan tujuan untuk memajukan pendidikan agama Islam secara murni di kalangan bangsa Arab peranakan. Untuk itu mereka mendirikan madrasah al-Irsyad, terutama di daerah pesisir, seperti Surabaya, Pekalongan, Tegal, dan Jakarta. Dalam bidang sosial dan dakwah Islam dengan dasar Al Quran dan As-Sunnah secara murni.

Organisasi Persatuan Islam didirikan oleh KH Zamzam, ulama dari Palembang pada 17 September 1923 di Bandung. Tujuan Persis adalah mengembalikan kepemimpinan Islam pada Al Quran dan hadist. Guna mewujudkan cita-cita tersebut, Persis melakukan berbagai usaha seperti mendirikan madrasah, pesantren, kegiatan tabligh, serta menerbitkan majalah dan buku agama. Majalah yang cukup populer di kalangan kaum muslimin di Indonesia dan bahkan di mancanegara seperti Malaysia adalah majalah *Pembela Islam* dan *Al-Muslimun*.

Kiprah Persis dalam memerangi bid'ah dan khurafat yang disampaikan secara keras dan lugas memang sangat menonjol. Sikap semacam itu semakin menonjol di saat kepemimpinan ustadz A. Hasan, yang terkenal karena pena dan lidahnya yang tajam dalam menegakkan pemurnian agama. Popularitas A. Hasan saat memimpin Persis adalah korespondensi yang beliau lakukan dengan Bung Karno saat dibuang ke Ende. Surat itu kemudian diterbitkan dalam bagian dari buku Bung Karno yang terkenal, yaitu *Di Bawah Bendera Revolusi* dalam bab *Surat-surat Dari Ende*.

Organisasi Muhammadiyah didirikan di kampung Kauman Yogyakarta pada 18 November 1912. Sasaran dan wilayah gerak kegiatan Muhammadiyah seperti termaktub dalam anggaran dasar pertama adalah penduduk Jawa dan Madura. Kondisi objektif yg mendasari kelahiran Muhammadiyah adalah faktor internal yang terdiri dari ketidakmurnian amalan Islam sebagai akibat tidak dijadikannya Al Quran dan Sunnah Rasul sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap

mengemban misi selaku kalifah di muka bumi. Sementara itu, faktor objektif eksternal adalah semakin meningkatnya Kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, penetrasi bangsa Eropa terutama Belanda di Indonesia pada masa kolonial, serta pengaruh gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Di samping faktor tersebut menurut Mukti Ali (Mukti Ali, 1985 dalam Pasha dan Darban, 2002), kelahiran Muhammadiyah dilatarbelakangi empat hal yang penting, yaitu (a) ketidakbersihan dan campuraduknya kehidupan agama Islam di Indonesia, (b) ketidakefisienan lembaga pendidikan Islam, (c) aktivitas misi Katolik dan Protestan, dan (d) sikap acuh tak acuh, bahkan sikap merendahkan dari golongan intelektual terhadap Islam.

Rumusan tujuan Muhammadiyah sejak didirikan sampai sekarang telah mengalami perubahan kalimat meskipun tanpa mengubah isi dan jiwanya. Pada saat didirikan tujuan Muhammadiyah adalah (a) menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putera, di dalam Residensi Yogyakarta dan (b) memajukan hal agama Islam kepada anggotanya.

Rumusan itu telah berubah sebanyak tujuh kali. Terakhir adalah pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta pada 11 Juli 2000. Perubahan atas asas yang disesuaikan dengan perundangan yang ada, yaitu dengan *menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil makmur yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala* (Pasha dan Darban, Ibid).

Amal usaha Muhammadiyah terdiri atas bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Bidang keagamaan sesungguhnya menjadi pusat seluruh kegiatan, dasar, dan jiwa amal usaha Muhammadiyah. Kegiatan Muhammadiyah di bidang lain dilakukan karena dorongan keagamaan semata, karena sebenarnya kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, perekonomian, pendidikan, serta politik itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa, dasar dan semangat keagamaan.

Secara khusus dalam bidang keagamaan ditandai dengan dibentuknya Majelis Tarjih pada 1927. Lembaga ini sebagai tempat menghimpun ulama secara periodik melakukan musyawarah dan memberikan fatwa tentang tuntunan dan pedoman dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang diberikan Rasulullah, dalam menentukan awal dan akhir puasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, mendirikan mushalla khusus wanita, penghitungan zakat pertanian, perikanan, peternakan, serta mengatur agar sampai ke tangan yang berhak, tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana.

Pemisahan antara sekolah umum dan sekolah agama sejak Muhammadiyah belum didirikan masih berlangsung terus sampai sekarang. Muhammadiyah percaya pentingnya penguasaan ilmu umum serta ilmu agama secara bersamaan. Karena dengan pemisahan tersebut hasilnya adalah seperti apa yang dapat disaksikan pada pergantian milenium di Indonesia ini yaitu dengan mudahnya orang goyah dan goncang hidupnya dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Karena tidak mungkin menghapuskan sekolah umum dan pesantren, Muhammadiyah berusaha memadukan keduanya dengan cara (a) mendirikan sekolah umum dengan memasukkan ke dalamnya ilmu agama serta (b) mendirikan madrasah yang diberi pendidikan pengajaran ilmu pengetahuan umum.

Dengan perpaduan tersebut, tidak ada lagi perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua adalah wajib dan di bawah naungan agama. Lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah sejak dari kelompok bermain, tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, serta perguruan tinggi jumlahnya ribuan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah pada tahun 2007 sebanyak 175 buah beberapa di antaranya telah mempunyai reputasi internasional.

Sebagai gerakan, Muhammadiyah mempunyai tugas dakwah Islam dan *amar makruf nahi munkar* dalam bidang kemasyarakatan.

Usaha yang dilakukan dalam bidang ini antara lain mendirikan rumah sakit modern, mendirikan panti asuhan, mendirikan perusahaan seperti percetakan dan toko, mendirikan dana pensiun, serta bimbingan dan penyuluhan keluarga. Keluarga adalah dasar bagi kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, Muhammadiyah sangat prihatin dengan terwujudnya keluarga sejahtera lahir batin dengan membentuk unit perencanaan keluarga sejahtera di tiap wilayah dan daerah di seluruh Indonesia.

Perkumpulan Nahdatul Ulama didirikan dengan sponsor Kyai Hasyim Asy'ari di Surabaya pada 31 Januari 1926. Alasan yang mendasari didirikannya organisasi ini adalah dimaksudkan sebagai reaksi atas keberhasilan kaum modernis di Indonesia serta adanya kekhawatiran ulama orthodox bahwa niat SI dan Muhammadiyah tentang Kongres Islam Sedunia yang dipengaruhi Raja Ibnu Saud dari Saudi Arabia akan mendatangkan pengaruh Wahabi di negeri ini (Pringgodigdo, 1949:91). Berkaitan dengan hal itu, pada September 1926 NU mengadakan kongres di Surabaya sebagai aksi menentang Konggres PSI-MAIHS bersama.

Sebagaimana Muhammadiyah, NU tidak mencampuri politik. Adapun tujuan didirikannya NU adalah untuk memajukan keempat paham madzab yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali dengan jalan (a) memelihara hubungan antar ulama keempat aliran ini; (b) menjaga supaya pelajaran agama Islam jangan sampai tertulis kaum modernis; (c) propaganda Islam berdasarkan paham ortodoks; (d) memajukan pendidikan Islam; dan (e) memelihara masjid.

Nadhatul Ulama menyelenggarakan kongres pada tanggal 2-11 Oktober 1928 di Surabaya. Kongres mengeluarkan pernyataan yang menentang reformisme oleh kaum modernis dan kaum Wahabi di Hejaz. Kaum reformis dinilai oleh kaum ortodoks sebagai bersikap seperti kaum nasionalis saja yang tidak mendasarkan pada agama, seperti propaganda untuk mencapai kesejahteraan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, terutama

dalam memperjuangkan persamaan hak bagi kaum wanita Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, kongres memandang perlu menyusun agenda untuk membicarakan pelaksanaan peraturan Islam, masalah keluarga seperti perceraian (*taklik dan chuluk*), serta masalah dalam melakukan ibadah haji. Nadhatul Ulama berhasil menebarkan pengaruhnya di beberapa daerah terutama di Surabaya, dan daerah sekitarnya seperti Kediri, Bojonegoro, serta di Jawa Tengah termasuk Kudus dan sekitarnya.

ORGANISASI ISLAM DAN POLITIK

Sarekat Islam, dengan masuknya Cokroaminoto pada tahun 1912, mengalami kemajuan yang pesat berupa meluasnya dukungan bukan saja di seluruh Jawa, tetapi juga sampai ke Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi serta anggotanya mencakup berbagai lapisan masyarakat. Benda (1980) menyatakan bahwa SI mempunyai daya tarik yang jauh jangkauannya di luar penduduk kota yang berpendidikan Barat. Tujuh tahun setelah Cokroaminoto memimpin SI, partai ini memusatkan perhatiannya secara eksklusif pada orang Indonesia dengan merekrut semua kelas, baik di kota maupun di desa. Mereka adalah pedagang muslim, pekerja di kota, kyai dan ulama, beberapa priyayi, dan tak kurang pula petani ditarik dalam partai politik yang pertama di Indonesia di masa kolonial ini.

Masuknya paham sosialis membuat SI pecah menjadi SI merah dan SI Putih. Maka dari itu, pertentangan intern semakin tidak terkendali sehingga pada Kongres SI 1921 disiplin partai pun diterapkan dengan hasil keluarnya tokoh SI Merah, yaitu Semaun, Darsono dan Tan Malaka, yang kemudian mendirikan Partai Komunis Hindia. Kongres juga memutuskan untuk lebih menekankan identitas gerakan politik Islam dengan kalimat *kemerdekaan yang berazaskan Islam ... yang sesungguhnya melepaskan segala rakyat dari penghambaan macam apapun jua* (Noer, 1985).

Pada Kongres tahun 1923, SI mengubah nama menjadi Partai Serikat Islam dan pada 1929 berubah nama lagi menjadi Partai Serikat

Islam Indonesia atau PSII. Pada 1940 terjadi perpecahan di tubuh PSII dengan keluarnya beberapa anggotanya dipimpin oleh Kartosuwiryo yang mendirikan perkumpulan sendiri sehingga ada dua PSII biasa dan PSII Kartosuwiryo.

Muhammadiyah bukan organisasi politik dan tidak akan menjadi partai politik. Namun dengan adanya keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segenap kehidupan manusia di dunia, dengan sendirinya segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia juga menjadi bidang garapannya, tak terkecuali soal politik kenegaraan. Meskipun demikian, keterlibatan Muhammadiyah dalam politik kenegaraan masih dalam batas sebagai gerakan dakwah Islam *amar makruf nahi mungkar* dan sama sekali bukan bermaksud menjadi partai politik (Pasha dan Darban, 2002:135; Alfian, 1989; Korver, 1982).

Atas dasar pendirian semacam itulah, KHA Dahlan duduk dalam kepengurusan Budi Utomo, menjadi penasihat pimpinan SI. Begitu pula pimpinan Muhammadiyah yang lain seperti KH Fakhruddin, KH Mas Mansyur, Ki Bagus Hadikusumo dan Prof. Hamka pada dasarnya mempunyai pandangan yang sama. Beberapa keterlibatan Muhammadiyah dalam bidang politik antara lain adalah

- (a) pajak atas hewan qurban ditentang Muhammadiyah dan ini berhasil pada masa kolonial;
- (b) pengadilan agama semua berada di bawah kantor agama kolonial. Muhammadiyah berjuang ke arah independensi umat Islam di Indonesia;
- (c) Muhammadiyah ikut memelopori lahirnya Partai Islam Indonesia. Pada tahun 1945 menjadi pendukung utama lahirnya Masyumi;
- (d) ikut menanamkan nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia dengan semboyan *hizbul wathan minal iman*, cinta tanah air satu cabang keimanan.

Di samping SI dan Muhammadiyah, Persis juga mempunyai kader yang tampil dalam

kancah politik nasional, yaitu Muhammad Natsir. Pengaruh doktrin Persis tertanam kuat dalam pribadi Natsir yang tampak saat ia diberi hadiah oleh Lembaga Islam Internasional di Saudi Arabia uang tersebut digunakan untuk membangun masjid yang megah. Ketika ditinjau oleh lembaga donor dan ditanya mana rumahnya, ia menunjukkan salah satu kamar yang ada di kompleks masjid tersebut.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan Islam merupakan satu fenomena yang mencerminkan jiwa zamannya. Lingkungan kultural dan sosial mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dan membangun jaringan, merumuskan masalah, mencari jalan keluar, dan melakukan tindakan reformasi sosial dan kultural. Faktor eksternal yang merupakan faktor penentu bagi munculnya proses transformasi dapat berlangsung secara lebih cepat daripada faktor internal. Peran media massa sangat menunjang keberhasilan sosialisasi gagasan baru baik dalam skala nasional maupun internasional.

Gerakan Reformasi Islam telah berhasil menunjukkan keberhasilannya secara fisik. Lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan sosial, seperti rumah sakit, gedung perkantoran, dan sarana-prasarana fisik lainnya, sudah berhasil diwujudkan.

Efektivitas dari Gerakan Reformasi yang sudah berlangsung hampir satu abad masih memendam pertanyaan besar yaitu seberapa jauh gerakan ini berhasil menjawab tantangan jaman. Negara Indonesia yang mengalami krisis kepemimpinan saat ini belum mampu menghadirkan tokoh yang bisa memberikan keteladanan. Lalu, di manakah hasil kerja kaum reformis selama ini?

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: IP3ES.

- Alfian, 1989. *Muhammadiyah the Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Benda, H.J., 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia di Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Rustika Jaya.
- Dick, Howard. 1985. *The Emergence of National Economy in the Netherlandsch Indie*. Dordrecht: Foris Publication.
- Dobbins, C. 1992. *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatra Tengah 1794-1847*. Jakarta: INIS.
- Fox, J.J., t.th. *Indonesian Heritage: Religion and Ritual*. Volume 9. Singapore: Archipelago Press.
- Junus, Mohammad. 1985. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hikmah Karya Agung.
- Kartodirdjo, Sartono. 1962. *Gerakan Mesianisme dalam Sedjarah Indonesia*. Pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada.
- Korver, A.P.E. 1982. *Sarekat Islam 1912-1916 Opkomst, Bloei en Structuur van Indonesie's Eerste Massabeweging*. Amsterdam Historische Reeks 3. Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam.
- Noer, Deliar. 1985. *Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia Tahun 1840-1942*. Jakarta: IP3ES.
- Padro, Soegijanto. 2004. *Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Pasha, Musthafa Kamal dan Adaby Darban. 2002. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.
- Pringgodigdo, A.K., 1949. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakjat.
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel*. Yogyakarta: Tiara Wacana.